



[RINGKASAN] LPPD 2023

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2023**

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2023 merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Penyampaian RLPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan amanat pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Ringkasan LPPD memuat a) capaian kinerja makro; b) ringkasan capaian urusan pelayanan dasar; c) hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya; d) ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan e) inovasi daerah. Ringkasan LPPD dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2023 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan tanggapan, saran dan kritik guna perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditahun-tahun mendatang.

II. PENJELASAN UMUM

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, selain 13 Kabupaten / Kota lainnya, yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.

Secara yuridis formal Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Seiring dengan dinamika perkembangan wilayah dan tuntutan untuk pemekaran wilayah, maka sejak tahun 2002 Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yakni Kabupaten Kapuas (Kabupaten Induk), Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas (Kabupaten hasil pemekaran) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kapuas terletak pada $0^{\circ} 8' 48''$ - $3^{\circ} 27' 00''$ LS dan $113^{\circ} 2' 36''$ - $114^{\circ} 44' 00''$ BT dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara umum Luas Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu 17.070,39 Km² atau 9,77% dari luas Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi 17 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 214 Desa.

Topografis Kabupaten Kapuas pada bagian utara merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 100 - 500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan antara 8 – 15 derajat dan merupakan daerah perbukitan/pegunungan dengan kemiringan \pm 15 – 25 derajat. Pada bagian selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0 – 5 meter dari permukaan air laut yang mempunyai elevansi 0 % - 8 % serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang berpotensi banjir cukup besar terutama pada saat air laut pasang / naik.

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Kapuas saat ini dapat dikelompokkan menjadi 4 ordo, 13 group, dan 15 sub group macam tanah. Keempat ordo tersebut adalah: Histosol, Entisol, Inceptisol dan Ultisol. Keadaan klimatologi di Kabupaten Kapuas pada saat ini umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur berkisar antara 21 – 23 derajat Celsius dan maksimal mencapai 36 derajat Celsius. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak, sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Pebruari, berkisar diantara 116 – 973 mm tiap tahun, sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada Juli sampai dengan Oktober.

C. Jumlah penduduk

Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas tahun 2023 tercatat sebanyak 415.210 jiwa yang terdiri dari laki-laki 214.489 jiwa dan perempuan 200.721 jiwa.

D. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Adapun Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 21 Dinas, 6 Badan, 1 RSUD, 17 Kecamatan dan 2 Lembaga Teknis Lainnya. Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan selain dukungan dana, faktor yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 2023 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sejumlah 5.066 orang, Jumlah tersebut terdiri dari golongan I sebanyak 8 orang, golongan II sebanyak 409 orang, golongan III sebanyak 2.820 orang dan golongan IV sebanyak 1.829 orang.

III. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Laporan capaian kinerja tersebut memuat data atau informasi kinerja urusan pemerintahan sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan nomor 13 tahun 2019 tentang Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Sumber informasi utama untuk data pendukung yang dituangkan dalam LPPD berasal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan secara lengkap dapat di jelaskan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro yang merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 secara umum. Ada 6 (enam) aspek capaian kinerja makro yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan pemerintah baik itu pemerintah pusat daerah maupun pihak swasta dan pihak lainnya yang juga terkait, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1
Tabel Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kapuas

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	LAJU KINERJA
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IDM)	70,01	70,75	1,06
2	Angka Kemiskinan	5,52	5,21	-5,62
3	Angka Pengangguran	3,91	3,66	-6,39
4	Pertumbuhan Ekonomi	7,04	5,71	-18,89
5	Pendapatan Per Kapita	54,34	55,73	2,56
6	Ketimpangan Pendapatan	0,303	0,305	0,66

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2024

B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar. Urusan wajib terkait pelayanan dasar mencakup urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

a. Capaian Kinerja Outcome Urusan Pendidikan

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Realisasi Hasil Pencapaian Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja Tahun n-1	Capaian Kinerja Tahun n
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	73,89 %	73,66 %
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,30 %	90,96 %
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	73,84 %	80,20 %
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	59,17 %	4,40 %

b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Program/Kegiatan urusan pendidikan di Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3
Program dan Kegiatan yang mendukung Urusan Pendidikan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan PAUD	199.267.200	199.267.200	100%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	199.267.200	199.267.200	100%
2	Program Pengelolaan Pendidikan Dasar	439.750.000	439.750.000	100%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	439.750.000	439.750.000	100%
3	Program Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	199.980.000	199.980.000	100%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	199.980.000	199.980.000	100%
4	Program Pendidikan Non Formal	99.927.750	99.927.750	100%
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.927.750	99.927.750	100%

c. Permasalahan yang dihadapi

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pendidikan di Kabupaten Kapuas tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam penyusunan SPM, baik jangkauan internet antar kecamatan, serta kurang tersedianya SDM ASN yang memadai untuk mendukung dan pengisian SPM secara elektronik maupun manual.
- 2) Kurangnya pemahaman dan komitmen personil/pegawai yang menangani urusan pendidikan terhadap penerapan pemenuhan SPM Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

a. Capaian Kinerja Outcome Urusan Kesehatan

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Hasil Pencapaian Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja Tahun n-1	Capaian Kinerja Tahun n
1	2	3	4
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,34	0,55
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	100 %
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,14 %	89,04 %
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,18 %	75,01 %
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93,84 %	90,36 %
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95,15 %	73,58 %
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,05 %	83,54 %
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	62,95 %	60,27 %
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,13 %	90,55 %
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67,48 %	73,83 %
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	42,09 %	100 %
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	68,05 %	61,90 %

b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Program/Kegiatan urusan kesehatan di Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5
Program dan Kegiatan yang mendukung Urusan Kesehatan

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp) Perubahan	Realisasi Anggaran	
			Keuangan (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	130,320,901,392	111,584,326,084	85.62
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294,478,000	170,916,177	58.04
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58,616,000	58,611,777	99.99
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104,499,100	86,149,000	82.44
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131,362,900	26,155,400	19.91
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116,403,792,591	88,728,964,594	76.23
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	116,127,126,591	88,521,339,594	76.23
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,020,000	2,760,000	91.39
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	124,271,000	55,685,000	44.81
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	149,375,000	149,180,000	99.87
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	310,290,130	282,625,800	91.08
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	310,290,130	282,625,800	91.08
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,500,000	37,494,000	99.98
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	37,500,000	37,494,000	99.98
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,519,052,136	1,144,227,491	75.33
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,579,000	10,440,000	98.69
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221,820,200	166,499,450	75.06
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,665,828	15,166,850	81.25
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,363,042	83,730,500	90.65
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	135,500,000	128,660,000	94.95
	Fasilitas Kunjungan Tamu	50,000,000	26,381,000	52.76
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	990,124,066	713,349,691	72.05
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	396,753,060	376,773,735	94.96
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	396,753,060	376,773,735	94.96
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,110,400,000	10,029,959,898	99.20
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21,600,000	13,200,000	61.11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381,800,000	340,666,144	89.23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,707,000,000	9,676,093,754	99.68
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,248,635,475	783,404,491	62.74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194,110,000	155,484,492	80.1

No	Program dan Kegiatan		Pagu (Rp) Perubahan	Realisasi Anggaran	
				Keuangan (Rp)	%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	332,125,475	310,535,230	93.5
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	722,400,000	317,384,769	43.93
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		112,551,006,876	100,599,998,322	89.38
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		80,464,854,536	71,248,684,228	88.55
1		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	63,690,610,000	56,568,678,833	88.82
2		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,952,548,000	6,931,143,368	87.16
3		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,091,678,536	943,789,102	86.45
4		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,228,163,000	2,227,852,400	99.99
5		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,527,418,336	3,259,749,234	92.41
6		Pengadaan Obat, Vaksin	800,000,000	759,972,650	95
7		Pengadaan Bahan Habis Pakai	754,322,664	199,940,781	26.51
8		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	420,114,000	357,557,860	85.11
B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30,631,937,340	28,279,266,924	92.32
1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	393,728,250	188,650,000	47.91
2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	386,634,900	172,493,100	44.61
3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	152,491,050	136,100,000	89.25
4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	375,385,500	245,125,000	65.3
5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	252,934,294	213,578,000	84.44
6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1,299,184,506	1,138,246,281	87.61
7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	197,293,100	162,644,856	82.44
8		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	236,130,000	106,610,000	45.15
9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	371,697,000	304,930,000	82.04
10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	62,537,500	61,221,000	97.89
11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	258,300,000	193,012,200	74.72
12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	210,000,000	207,488,062	98.8
13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	43,952,500	43,100,000	98.06
14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	239,122,500	202,231,100	84.57
15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	64,524,000	63,479,900	98.38
16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	947,194,000	891,103,428	94.08

No	Program dan Kegiatan		Pagu (Rp) Perubahan	Realisasi Anggaran	
				Keuangan (Rp)	%
17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	781,480,000	770,690,700	98.62
18		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	351,362,000	275,228,667	78.33
19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5,226,000	4,045,000	77.4
20		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	93,464,000	93,393,500	99.92
21		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,612,464,400	1,430,270,744	88.7
22		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20,160,448,000	19,758,046,818	98
23		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	21,374,000	21,340,000	99.84
24		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	349,999,340	313,695,012	89.63
25		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1,343,012,000	1,158,796,356	86.28
26		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	238,552,500	20,650,000	8.66
27		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	183,446,000	103,097,200	56.2
C		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,454,215,000	1,072,047,170	73.72
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1,454,215,000	1,072,047,170	73.72
III		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	432,488,000	432,269,989	99.95
A		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	98,240,000	98,225,000	99.98
1		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	98,240,000	98,225,000	99.98
B		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	334,248,000	334,044,989	99.94
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	117,582,000	117,529,820	99.96
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	216,666,000	216,515,169	99.93
IV		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	789,729,400	725,228,389	91.83
A		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	364,305,400	355,314,620	91.69
1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	215,809,000	208,155,000	96.45
2		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	148,496,400	147,159,620	99.1
B		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	425,424,000	391,183,400	91.95

No	Program dan Kegiatan		Pagu (Rp) Perubahan	Realisasi Anggaran	
				Keuangan (Rp)	%
1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	425,424,000	391,183,400	91.95
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		989,036,000	766,353,000	77.48
A		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	124,724,000	121,650,000	97.54
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	124,724,000	121,650,000	97.54
B		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	659,842,000	489,553,000	74.19
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	659,842,000	489,553,000	74.19
C		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204,470,000	155,150,000	75.88
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	204,470,000	155,150,000	75.88
PAGU TOTAL			245,083,161,668	187,785,842,018	76.62

c. Permasalahan yang dihadapi

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan kesehatan di Kabupaten Kapuas tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019.
- 2) Advokasi lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten masih belum berjalan dengan baik.
- 3) Sumber daya sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar serta distribusi tenaga kesehatan sesuai standar yang belum merata.

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Capaian Kinerja Outcome Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Realisasi Hasil Pencapaian Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja Tahun n-1	Capaian Kinerja Tahun n
1	2	3	4
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0 %	0 %
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0 %	0 %
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	67,47 %	60 %
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	63,57 %	71,94 %
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	59,25 %	61,19 %
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100 %	100 %
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	53,79 %	53,06 %
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	76 %	0 %
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 %	0 %

b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Program/Kegiatan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 7
Program dan Kegiatan yang mendukung Urusan Pekerjaan Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
A.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.835.799.085	2.711.620.000	95,62
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.835.799.085	2.711.620.000	95,62
	- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.500.000.000	2.380.820.000	95,23
	- Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Tumbang Tihis	335.799.085	330.800.000	98,51

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
B.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.050.000.000	985.600.000	93.87
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000.000	985.600.000	93.87
	- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.000.000.000	942.500.000	94,25
	- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	50.000.000	43.100.000	86,20

c. Permasalahan yang dihadapi

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pekerjaan umum di Kabupaten Kapuas tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Untuk mencapai target rumah tangga berakses air minum tinggi, ditemui kendala berupa dana yang terbatas untuk bisa mencakup seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kapuas, disamping juga terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target yang tinggi.
- 2) Dana yang terbatas untuk bisa mencakup seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kapuas, disamping juga terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target yang tinggi.
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki toilet dan tangki septik yang sesuai dengan standar
- 4) Terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target juga menjadi permasalahan serius mengingat adanya IPLT yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Capaian Kinerja Outcome Urusan Perumahan Rakyat

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat yang diperoleh oleh Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Realisasi Hasil Pencapaian Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja Tahun n-1	Capaian Kinerja Tahun n
1	2	3	4
1.	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0 %	12,50 %
2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	75 %
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0 %	0 %
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0 %	10,38 %
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0 %	0 %

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja Program/Kegiatan urusan perumahan rakyat di Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 9

Program dan Kegiatan yang mendukung Urusan Perumahan Rakyat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
A.	Program Pengembangan Perumahan	200.000.000	200.000.000	100
1.	Pendataan dan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabuapten / kota	120.000.000	120.000.000	100
	- Sub Kegiatan Identifikasi Lahan – Lahan Potensial sebagai korban lokasi Relokasi Perumahan	120.000.000	120.000.000	100
2.	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / Rumah Khusus	80.000.000	80.000.000	100
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan kelembagaan Bagi Pemilik / Penghuni Rumah susun	80.000.000	80.000.000	100

c. Permasalahan yang dihadapi

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan perumahan rakyat di Kabupaten Kapuas tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) SPM bidang perumahan dan permukiman belum bisa dilaksanakan karena ada kegiatan infrastruktur lain yg sangat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya berupa peningkatan infrastruktur jalan dan bangunan yang lebih membutuhkan anggaran sehingga pelaksanaan SPM perumahan dan permukiman tsb ditunda hingga anggaran tersedia.
- 2) Untuk SPM perumahan dan permukiman TA. 2022 hanya dilakukan pendataan terutama bagi korban bencana kabupaten.
- 3) Hingga saat ini belum ada juklak dan juknis untuk pelaksanaan kegiatan Fisik SPM Perumahan Rakyat tersebut.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Outcome Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 10

Realisasi Hasil Pencapaian Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja Tahun n-1	Capaian Kinerja Tahun n
1	2	3	4
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	27,27 %	36,36 %
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	94,09 %

No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja Tahun n-1	Capaian Kinerja Tahun n
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	12,27 %	42,10 %
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,93 %	100 %
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	5,92	6,10

b. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Program/Kegiatan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 11
Program dan Kegiatan yang mendukung Urusan Trantibum dan Linmas

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	291.567.250	286.449.170	98,24
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	188.506.250	186.339.770	98,85
	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 	113.835.000	113.471.100	99,68
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 	28.307.000	27.956.920	98,76
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 	46.364.250	44.911.750	96,87
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	88.680.000	88.535.000	99,84
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 	21.480.000	21.395.000	99,60
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali 	67.200.000	67.140.000	99,91
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	14.381.000	11.574.400	80,23
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 	14.381.000	11.574.400	80,23
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.109.008.000	5.029.470.140	98,44
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	4.113.153.000	4.034.480.140	98,09
	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 	15.300.000	15.159.000	99,08
	<ul style="list-style-type: none"> Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 	89.151.000	80.890.000	90,73
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 	3.360.000	3.360.000	100
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 	4.005.342.000	3.935.071.140	98,25

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.260.000	1.260.000	100
	• Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.260.000	1.260.000	100
	Investigasi Kejadian Kebakaran	3.360.000	3.080.000	91,67
	• Investigasi Kejadian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	3.360.000	3.080.000	91,67
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	991.235.000	990.650.000	99,94
	• Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	991.235.000	990.650.000	99,94
3.	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	1.092.506.673	765.520.023	70,07
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	323.250.000	305.931.404	94,52
	• Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	323.250.000	305.931.404	94,52
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	101.274.000	0	0
	• Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0
	• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	0	0	0
	• Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	0	0	0
	• Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Penyusunan Rencana Kontijensi	101.274.000	0	0
	• Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0
	• Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	0	0	0
	• Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	0	0	0
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	667.982.673	459.588.619	68,80
	• Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	0	0	0
	• Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	• Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	276.483.273	247.217.397	89,41
	• Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	391.499.400	212.371.222	54,25
	• Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	0	0	0

c. Permasalahan yang dihadapi

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kapuas tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam menegakkan Perda dan Perkada serta dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan juga pemadaman kebakaran
- 2) Rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dan kurangnya jumlah personil sehingga tidak ada Anggota Pol PP dan Damkar yang ditempatkan di Kecamatan-kecamatan
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Perda dan Perkada. Masyarakat terkesan main *kucing-kucingan* dengan petugas. Mereka taat saat ada petugas, ketika petugas tidak ada mereka melakukan pelanggaran lagi.
- 4) Dalam Dokumen Perencanaan dalam alokasi penganggaran masih belum memprioritaskan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal khususnya yang berkaitan dengan Sub Urusan Kebencanaan.
- 5) Keterbatasan informasi dan pengetahuan terkait Standar Pelayanan Minimal yang diatur melalui peraturan perundang – undangan,
- 6) Minimnya data dukung terkait pemenuhan pelayanan dasar Sub Urusan Kebencanaan, dan
- 7) Masih belum memahami sepenuhnya terkait pengisian tabel yang sudah diatur dalam Permendagri

6. Urusan Sosial

a. Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Realisasi Hasil Pencapaian Urusan Sosial Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja Tahun n-1	Capaian Kinerja Tahun n
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %	0,89 %
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %

b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Program/Kegiatan urusan sosial di Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 13
Program dan Kegiatan yang mendukung Urusan Sosial

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
A.	Program Rehabilitasi Sosial	490.517.237	490.457.237	99.99
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	490.517.237	490.457.237	99.99
	• Penyediaan permakanaan	236.000.000	236.000.000	100
	• Penyediaan sandang	4.250.000	4.250.000	100
	• Penyediaan alat bantu	52.500.000	52.500.000	100
	• Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3.110.000	3.110.000	100
	• Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	4,684,000	4.684.000	100
	• Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	77.566.240	77.566.240	100
	• Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	560.000	560.000	100
	• Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	27.665.000	27.665.000	100
	• Pemberian layanan data dan pengaduan	34.600.000	34.540.000	99,83
	• Pemberian layanan kedaruratan	19.913.800	19.913.800	100
	• Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6.060.000	6.060.000	100
	• Pemberian layanan rujukan	23.608.197	23.608.197	100
B.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	98.588.511	98.588.511	100
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	98.588.511	98.588.511	100
	• Penyediaan makanan	21.172.336	21.172.336	100
	• Penyediaan sandang	6.250.000	6.250.000	100
	• Penyediaan tempat penampungan pengungsi	16.375.000	16.375.000	100
	• Penanganan khusus bagi kelompok rentan	6.036.175	6.036.175	100
	• Pelayanan dukungan Psikososial	48.755.000	48.755.000	100

c. Permasalahan yang dihadapi

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Kabupaten Kapuas tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebutuhan pada Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota hanya berdasarkan perkiraan, sehingga berpotensi terjadi realisasi lebih besar dari target.
- 2) Data PPKS yang tidak *up to date*, sehingga berpotensi pelayanan yang kurang tepat sasaran.
- 3) Data yang terkumpul kemungkinan tidak mengcover semua PPKS karena kendala jarak dan jangkauan wilayah yang cukup luas, serta keterbatasan SDM dalam pengumpulan data dimana tidak semua lokasi terdapat SDM Sosial.

IV. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

A. Hasil EPPD terhadap LPPD Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6466 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas berhasil mendapatkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan skor kinerja **2,8711** dengan status kinerja **Sedang**.

B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Nomor 49.B/LHP/XIX.PAL/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kapuas berhasil mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 yang berarti sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Unaudited) Tahun 2023 bahwa realisasi Pencapaian Kabupaten Kapuas Tahun 2023 sebesar Rp. 2.621.655.503.641 atau mencapai 111,49 %. Sedangkan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 2.133.296.541.651 atau mencapai 84,59 %.

Adapun rincian realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 14
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN MELIPUTI :		2.351.499.510.784	2.621.655.503.641	111,49
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH :	125.868.780.784	138.169.280.021	109,77
	A. Pendapatan Pajak Daerah :	38.921.025.000	42.289.931.899	108,66
	1. Pajak Hotel	456.200.000	591.201.712	129,59
	2. Pajak Restoran	10.125.500.000	13.856.117.814	136,84
	3. Pajak Hiburan	86.700.000	148.609.087	171,41
	4. Pajak Reklame	439.000.000	455.775.871	103,82
	5. Pajak Penerangan Jalan	10.200.000.000	10.501.990.617	102,96
	6. Pajak Parkir	120.000.000	73.913.200	61,59
	7. Pajak Air Tanah	330.750.000	310.886.739	93,99
	8. Pajak Sarang Burung Walet	2.315.000.000	187.348.000	8,09
	9. Pajak mineral bukan logam dan batuan	4.007.875.000	4.427.698.161	110,47
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000	3.776.290.392	107,89
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.340.000.000	7.960.100.305	108,45
	B. Hasil Retribusi Daerah :	7.644.300.000	5.983.885.900	78,28
	1. Retribusi Jasa Umum	2.320.000.000	2.111.749.132	91,02
	2. Retribusi Jasa Usaha	4.122.300.000	2.614.758.996	63,43
	3. Retribusi Perizinan tertentu	1.202.000.000	1.257.377.772	104,61

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	4.695.000.000	27.049.143	0,58
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	4.695.000.000	27.049.143	0,58
	D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :	74.608.455.784	89.868.413.079	120,45
	1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000	676.947.838	1.353,90
	2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000	64.000.000	128,00
	3. Jasa Giro	4.000.000.000	8.146.453.677	203,66
	4. Pendapatan Bunga	4.000.000.000	4.831.166.486	120,78
	5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	711.822.506	0,00
	6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	3.862.681.804	0,00
	7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	9.849.630	0,00
	8. Pendapatan dari Pengembalian	0	1.758.021.604	0,00
	9. Pendapatan BLUD	65.858.455.784	69.807.469.534	106,00
	10. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	650.000.000	0	0,00
II.	PENDAPATAN TRANSFER :	2.225.630.730.000	2.482.886.214.563	111,56
	A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.133.090.730.000	2.344.130.128.576	109,89
	1. Dana Perimbangan	1.951.254.806.000	2.157.290.740.576	110,56
	2. Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0,00
	3. Dana Desa	181.835.924.000	186.839.388.000	102,75
	B. Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.540.000.000	138.756.085.987	149,94
	1. Pendapatan Bagi Hasil	92.520.000.000	138.586.085.987	149,79
	2. Bantuan Keuangan	20.000.000	170.000.000	850,00
III	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH :	0	600.009.057	0,00
	A. Pendapatan Hibah	0	600.009.057	0,00
	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	492.000.000	0,00
	2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0	0	0,00
	3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0	108.009.057	0,00

Sumber data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kapuas Tahun 2024

Sedangkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023

NO	URAIAN BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
1	2	3	4	5
	BELANJA MELIPUTI :	2.521.918.363.231	2.133.296.541.651	84,59
I.	BELANJA OPERASI :	1.504.884.295.444	1.263.553.235.537	83,96
	A. Belanja Pegawai	791.596.132.986	617.979.936.208	78,07
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	437.575.181.691	371.453.912.417	84,89
	2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	197.017.560.000	96.450.984.530	48,96
	3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	129.973.998.545	125.428.743.949	96,50
	4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.268.216.000	23.720.431.801	93,87
	5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	877.347.700	308.992.561	35,22
	6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	815.291.000	552.480.000	67,76
	7. Belanja Pegawai BLUD	68.538.050	64.390.950	93,95
	B. Belanja Barang dan Jasa	584.259.070.997	535.019.096.570	91,57
	1. Belanja Barang	70.065.565.737	62.219.226.509	88,80
	2. Belanja Jasa	165.038.396.609	151.765.451.424	91,96
	3. Belanja Pemeliharaan	24.427.775.432	20.806.911.950	85,18
	4. Belanja Perjalanan Dinas	180.071.053.896	164.883.854.652	91,57
	5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.243.017.500	14.434.666.500	71,31
	6. Belanja Barang dan Jasa BOS	60.596.440.000	56.124.835.340	92,62
	7. Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.816.821.823	64.784.150.195	101,52
	C. Belanja Bunga	6.150.000.000	5.508.154.324	89,56
	1. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	2.350.000.000	1.949.944.847	82,98
	2. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.800.000.000	3.558.209.477	93,64
	D. Belanja Hibah	122.622.803.186	104.789.760.160	85,46
	1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	11.511.348.000	10.949.975.500	95,12
	2. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	170.000.000	100.000.000	58,82
	3. Belanja Hibah kepada BUMD	5.628.211.350	2.380.820.000	42,30
	4. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	103.995.013.836	90.040.734.660	86,58
	5. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.318.230.000	1.318.230.000	100
	E. Belanja Bantuan Sosial	256.288.275	256.288.275	100
	1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	256.288.275	256.288.275	100
	2. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0	0	0,00
II.	BELANJA MODAL :	610.505.117.487	497.590.153.221	81,50
	A. Belanja Modal Tanah	10.250.000.000	8.607.417.219	83,97
	Belanja Modal Tanah	10.250.000.000	8.607.417.219	83,97
	B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.394.175.908	79.563.896.620	96,56
	1. Belanja Modal Alat Besar	4.296.810.000	4.076.028.000	94,86
	2. Belanja Modal Alat Angkutan	21.088.934.434	20.467.365.749	97,05
	3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	71.325.000	70.390.750	98,69
	4. Belanja Modal Alat Pertanian	741.300.000	732.190.000	98,77
	5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.579.088.964	13.107.062.942	96,52

NO	URAIAN BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
1	2	3	4	5
	6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4.479.445.330	4.381.248.755	97,81
	7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.973.071.552	23.604.766.378	98,46
	8. Belanja Modal Alat Laboratorium	3.377.606.383	3.420.555.544	101,27
	9. Belanja Modal Komputer	8.891.171.912	8.689.220.778	97,73
	10. Belanja Modal Alat Eksplorasi	0	0	0,00
	11. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	278.700.000	278.699.800	100
	12. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.500.000	1.500.000	100
	13. Belanja Modal Rambu-Rambu	200.000.000	199.300.000	99,65
	14. Belanja Modal Peralatan Olahraga	20.000.000	20.000.000	100
	15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.395.222.333	515.567.924	36,95
	C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.225.682.172	96.495.440.040	90,84
	1. Belanja Modal Bangunan Gedung	105.715.249.086	95.993.824.717	90,80
	2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	353.081.000	351.627.823	99,59
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	157.352.086	149.987.500	95,32
	D. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	410.999.937.907	312.313.886.972	75,99
	1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan	393.823.322.677	297.255.645.626	75,48
	2. Belanja Modal Bangunan Air	11.929.675.230	9.847.865.051	82,55
	3. Belanja Modal Instalasi	1.800.000.000	1.798.900.000	99,94
	4. Belanja Modal Jaringan	3.446.940.000	3.411.476.295	98,97
	E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	535.321.500	509.512.370	95,18
	1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan	43.512.000	33.040.000	75,93
	2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	139.805.000	139.677.800	99,91
	3. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0	0,00
	4. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	352.004.500	336.794.570	95,68
	F. Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	100.000.000	100
	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100.000.000	100.000.000	100
III	BELANJA TIDAK TERDUGA :	45.476.804.500	6.170.159.923	13,57
	A. Belanja Tidak Terduga	45.476.804.500	6.170.159.923	13,57
	Belanja Tidak Terduga	45.476.804.500	6.170.159.923	13,57
IV.	BELANJA TRANSFER :	361.052.145.800	365.982.992.970	101,37
	A. Belanja Bagi Hasil	9.020.483.300	9.020.483.300	100
	1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.287.063.300	8.287.063.300	100
	2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	733.420.000	733.420.000	100
	B. Belanja Bantuan Keuangan	352.031.662.500	356.962.509.670	101,40
	1. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000	245.000.000	100
	2. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0	0	0,00
	3. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	351.786.662.500	356.717.509.670	101,40

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab. Kapuas Tahun 2024

VI. Inovasi Daerah

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

Tabel 16
Daftar Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas	SIMPUN (Sinde Muhun Pelayanan Uras Dinun)	Inovasi Pelayanan Publik
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas	PSJ (Pemburu Sidik Jari)	Inovasi Pelayanan Publik
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas	SICERMIN (Sistem Informasi Cepat Evaluasi Kinerja Manajemen Instansi Pemerintah)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas	ADIB (Agah Duan Ijin Bemotor)	Inovasi Pelayanan Publik
5.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Program Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas (PHKC)	Inovasi Pelayanan Publik

VII. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan ihtisar atau rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu kemudian akan dievaluasi melalui aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) yang berakhir pada bulan desember tahun 2024 bersamaan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah. Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras Aparatur Pemerintahan Daerah, *stakeholder* dan segenap masyarakat Kabupaten Kapuas.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal. Untuk itu, peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan yang positif dalam upaya penyempurnaan strategi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, sangat diharapkan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Kapuas yang semakin sejahtera.

Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, dengan tulus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Kuala Kapuas, Maret 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI